RINGKASAN

Muhammad Chairullah
247410101068

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE
(Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum dan Dr. Herinawati, S.H., M.Hum)

Dalam dua tahun terakhir (2024-2025), meningkatnya perkara perceraian di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menunjukkan adanya dinamika sosial dan hukum yang signifikan. Mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang diwajibkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diharapkan mampu menekan angka perceraian dan menciptakan penyelesaian yang lebih damai. Namun, ditemukan kesenjangan antara kondisi normatif dengan realitas empiris yang menunjukkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian. Isu hukum dalam penelitian ini meliputi tingkat efektivitas mediasi dalam mengurangi angka perceraian, faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan mediasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2024-2025 dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan mediasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mediasi mampu berperan sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efektif dalam mewujudkan perdamaian dan mengurangi angka perceraian.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yang bersifat preskriptif-analitis. Penelitian dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, dan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi telah berjalan sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun belum efektif dalam mengurangi angka perceraian. Data tahun 2024–2025 di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menunjukkan tidak adanya perkara perceraian yang berhasil didamaikan secara penuh. Faktor penghambat utama meliputi kuatnya keinginan para pihak untuk bercerai, konflik yang berkepanjangan, rendahnya itikad baik, dan tingginya eskalasi konflik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas mediator, optimalisasi pelaksanaan mediasi, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat agar mediasi dapat berfungsi lebih efektif sebagai sarana penyelesaian sengketa perceraian.

Kata Kunci: Mediasi Perceraian, Efektivitas Mediasi, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, PERMA No. 1 Tahun 2016

SUMMARY

Muhammad Chairullah 247410101068 — ***THE ROLE OF THE STATE ATTORNEY FOR CIVIL AFFAIRS AND STATE ENTERPRISES IN INDONESIA***
(Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum dan Dr. Herinawati, S.H., M.Hum)

Over the past two years (2024–2025), the increasing number of divorce cases at the Lhokseumawe Syar'iyah Court has reflected significant social and legal dynamics. Mediation, as a dispute resolution mechanism mandated by Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016, is expected to reduce divorce rates and promote more amicable settlements. However, a gap exists between the normative objectives of mediation and the empirical reality, which indicates a low success rate of mediation in divorce cases. This study addresses the legal issues concerning the effectiveness of mediation in reducing divorce rates, the factors hindering its implementation at the Lhokseumawe Syar'iyah Court, and the efforts undertaken to overcome such obstacles.

This study aims to analyze the effectiveness of mediation in resolving divorce disputes at the Lhokseumawe Syar'iyah Court during 2024–2025 and to identify the factors influencing the success and failure of the mediation process. In addition, it seeks to examine the extent to which mediation functions as an effective dispute resolution mechanism in promoting reconciliation and reducing divorce rates.

This research employs an empirical juridical legal research method with a prescriptive approach. The study was conducted at the Lhokseumawe Syar'iyah Court using both primary and secondary data. Data were collected through library research and field research, while the data analysis was carried out qualitatively.

The results indicate that the implementation of mediation has been conducted in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016; however, it has not been effective in reducing divorce rates. Data from 2024–2025 at the Lhokseumawe Syar'iyah Court reveal that no divorce cases were successfully resolved through full reconciliation. The main obstacles to effective mediation include the parties' strong intention to divorce, prolonged marital conflicts, lack of good faith, and the high escalation of disputes. Therefore, efforts are needed to enhance mediators' capacity, optimize the implementation of mediation, and strengthen public legal awareness so that mediation can function more effectively as a mechanism for resolving divorce disputes.

Keywords: Divorce Mediation, Mediation Effectiveness, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Supreme Court Regulation No. 1 of 2016